

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Menganti, Gresik

Febrianto Gaudensius Baus

Abstrak

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Menganti, Kabupaten Gresik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa di Desa Menganti telah dilakukan melalui publikasi informasi anggaran dan kegiatan pembangunan, seperti papan informasi dan musyawarah desa. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam akses informasi yang merata kepada seluruh masyarakat. Dari sisi akuntabilitas, pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi masih terdapat kendala dalam kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman administrasi keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Menganti tergolong cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa

Abstract

Village fund management is a strategic government policy aimed at improving community welfare and rural development. Transparency and accountability are key principles to ensure effective, efficient, and corruption-free management of village funds. This study aims to analyze the transparency and accountability of village fund management in Menganti Village, Gresik Regency, and to identify influencing factors. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. Informants included village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), and community members. The results indicate that transparency in village fund management has been implemented through budget information disclosure and development activities, such as information boards and village meetings. However, there are still limitations in ensuring equal access to information for all community members. In terms of accountability, the village government has prepared accountability reports in accordance with regulations, although challenges remain in human resource capacity and financial administration understanding. This study concludes that transparency and accountability in village fund management in Menganti Village are fairly good but require improvement through strengthening the capacity of village officials and enhancing community participation.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Funds

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya program dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh desa di Indonesia. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta mendorong kemandirian desa.

Dalam implementasinya, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik (Mardiasmo, 2009).

Desa Menganti sebagai salah satu desa di Kabupaten Gresik juga menerima alokasi dana desa yang digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa di Desa Menganti mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa di antaranya adalah kurangnya akses informasi bagi masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola keuangan desa.

Selain itu, pengawasan dari masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa akan semakin besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis transparansi pengelolaan dana desa di Desa Menganti
2. Menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola keuangan desa serta menjadi referensi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa secara mendalam. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Menganti, Kabupaten Gresik. Jenis dan sumber data. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa, BPD, dan Masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan desa, laporan pertanggungjawaban, serta regulasi terkait. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil dan Pembahasan

Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Menganti telah melakukan upaya transparansi melalui beberapa cara, seperti:

1. Pemasangan papan informasi anggaran desa
2. Pelaksanaan musyawarah desa (musdes)
3. Penyampaian laporan kegiatan kepada masyarakat

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat mengetahui alokasi dan penggunaan dana desa. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian informasi, terutama bagi masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan desa. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi masih belum optimal. Hal ini menyebabkan informasi belum dapat diakses secara luas oleh seluruh Masyarakat.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Menganti telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan tersebut mencakup:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Laporan kegiatan pembangunan

3. Laporan penggunaan dana desa

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam penyusunan laporan, terutama terkait dengan keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam bidang administrasi keuangan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Di Desa Menganti, partisipasi masyarakat terlihat dalam kegiatan musyawarah desa.

Namun, tingkat partisipasi masih belum merata. Sebagian masyarakat masih kurang aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut, sehingga pengawasan terhadap pengelolaan dana desa belum optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung:

1. Adanya regulasi yang jelas
2. Dukungan pemerintah daerah
3. Komitmen aparatur desa

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan sumber daya manusia
2. Rendahnya literasi masyarakat
3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi
4. Minimnya partisipasi masyarakat

Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan beberapa upaya, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas aparatur desa
2. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi
3. Peningkatan partisipasi masyarakat
4. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal

Penutup

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Menganti secara umum telah berjalan cukup baik. Pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban keuangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, terutama terkait dengan sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi.

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk transparansi
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
4. Memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi

Referensi

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis*. London: Sage Publications.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.